

**EVALUASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN SOSIAL KELUARGA  
HARAPAN DI KABUPATEN WONOGIRI PROVINSI JAWA TENGAH**  
(Studi Kasus Kecamatan Ngadirojo, Kecamatan Slogohimo, dan Kecamatan  
Kismantoro)

RIEN KUSUMA NINGRUM

NPP 30.0714

*Asdaf Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah*

*Program Studi Administrasi Pemerintahan Daerah*

Email : rienkusuma.ningrum3131@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Drs. Rizari, M.B.A., M.Si

**ABSTRACT**

**Problems/Background (GAP):** *Social protection is an important issue in ensuring the survival of the community from the risks of poverty, unemployment, and disability. This social protection system is manifested in one way or another with the Family Hope Program. PKH is a social assistance program that is provided to families who meet the requirements or someone who is said to be vulnerable and poor who are recorded in integrated data on the program for handling the poor which are handled and processed by the social welfare data and information center and determined to be PKH beneficiary families.* **Purpose:** *to determine the evaluation of social protection policies in the implementation of the Family Hope Program held in Wonogiri Regency, especially Ngadirojo District, Slogohimo District, and Kismantoro District.* **Method:** *The research method used in this research is descriptive qualitative research with an inductive approach. In collecting data, researchers used interview, observation, and documentation techniques. The data analysis technique used in this study is in the form of data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The theory used in this research is the policy evaluation theory according to Leo Agustino which is divided into five dimensions, namely apparatus resources, technological infrastructure, financial, institutional, and regulatory.* **Results/Findings:** *The implementation of PKH in Wonogiri Regency when viewed from the apparatus resources and technological infrastructure facilities is inadequate because there are still deficiencies. However, basically this implementation has been effective and efficient when viewed from institutional, financial and institutional suitability.* **Conclusion:** *There are still deficiencies in the implementation of social protection policies, but overall the program is still running well.*

**Keywords:** *Evaluation, Family Hope Program, Policy, Social Protection*

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Perlindungan sosial merupakan salah satu isu penting dalam menjamin keberlangsungan hidup masyarakat dari risiko kemiskinan, pengangguran, hingga disabilitas. Sistem perlindungan sosial ini diwujudkan salah satunya dengan adanya Program Keluarga Harapan. PKH yaitu program bantuan sosial yang diberikan pada keluarga yang memenuhi syarat atau seseorang yang dikatakan rentan dan miskin yang tercatat pada data terpadu program penanganan fakir miskin yang ditangani dan diproses oleh pusat data dan informasi kesejahteraan sosial serta ditetapkan menjadi keluarga penerima PKH. **Tujuan:** untuk mengetahui evaluasi dari kebijakan perlindungan sosial dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan yang diselenggarakan di Kabupaten Wonogiri terutama Kecamatan Ngadirojo, Kecamatan Slogohimo, dan Kecamatan Kismantoro. **Metode:** Metode penulisan yang digunakan dalam penulisan ini adalah penulisan kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penulisan ini yaitu berupa reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teori yang digunakan terkait penulisan ini adalah teori evaluasi kebijakan menurut Leo Agustino yang terbagi atas lima dimensi yaitu sumber daya aparatur, sarana prasarana teknologi, finansial, kelembagaan, dan regulasi. **Hasil/ Temuan:** Pelaksanaan PKH di Kabupaten Wonogiri apabila ditinjau dari sumber daya aparatur dan sarana prasarana teknologi belum memadai karena masih terdapat kekurangan. Namun, pada dasarnya pelaksanaan ini sudah efektif dan efisien apabila ditinjau dari kesesuaian kelembagaan, finansial, dan kelembagaan. **Kesimpulan:** Pelaksanaan kebijakan perlindungan sosial masih terdapat kekurangan, namun secara keseluruhan program ini tetap dapat berjalan dengan baik.

**Kata Kunci:** Evaluasi, Kebijakan, Perlindungan Sosial, Program Keluarga Harapan

### I. PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Kemiskinan merupakan suatu persoalan klasik yang dialami tiap negara, provinsi, kabupaten/kota bahkan daerah. Berdasarkan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri mendata banyaknya masyarakat Indonesia sebesar 275.361.267 jiwa yang membuat Indonesia masuk dalam peringkat 4 negara sebagai penduduk terbesar di dunia. Kondisi tersebut memunculkan permasalahan di Indonesia, salah satunya ialah adanya kesenjangan pendapatan di setiap daerah yang menyebabkan terjadinya kemiskinan. Kemiskinan turut dialami Provinsi Jawa Tengah. Bahkan menurut data Badan Pusat Statistik Indonesia tahun 2022, banyaknya masyarakat miskinnya nomor tiga paling besar sesudah Provinsi Jawa Timur serta Jawa Barat. Data tahun 2021 tercatat ada sekitar 36.742.500 orang miskin di Jawa Tengah. Terkait masalah



kemiskinan di Jawa Tengah, ada 14 Kabupaten dengan angka kemiskinan tertinggi termasuk Kabupaten Wonogiri. Kemiskinan di Kabupaten Wonogiri dicerminkan dengan adanya data mengenai banyaknya masyarakat miskin di Kabupaten Wonogiri. Sejak tahun 2014 sampai 2021, jumlah penduduk miskin Kabupaten Wonogiri fluktuatif, namun cenderung mengalami penurunan. Penurunan ini disebabkan karena adanya penanganan kemiskinan melalui kebijakan perlindungan sosial (*social protection*). Sistem perlindungan sosial ini diwujudkan dengan adanya Program Beras Untuk Keluarga Sejahtera (Rastra), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kredit Usaha Rakyat (KUR), Bantuan Langsung Tunai (BLT), serta dengan Program Keluarga Harapan (PKH). Tersedianya kebijakan perlindungan sosial ini, diharapkan pemerintah mampu menekan dan menurunkan angka kemiskinan Indonesia terutama di Provinsi Jawa Tengah dengan mengoptimalkan dengan baik seluruh program yang ada.

Kementerian Sosial membuat Permensos No.1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH). PKH yaitu program bantuan sosial yang diberikan pada keluarga yang memenuhi syarat ataupun seseorang yang dikatakan rentan dan miskin yang tercatat pada data terpadu program penanganan fakir miskin yang ditangani dan diproses oleh pusat data dan informasi kesejahteraan sosial serta ditetapkan menjadi keluarga penerima PKH. PKH telah dilaksanakan sejak tahun 2007. Dilaksanakannya program ini diharapkan mampu menurunkan angka kemiskinan dan menghentikan masalah kemiskinan dengan mengurangi jumlah penduduk miskin kategori ekstrem serta penduduk yang mengalami kelaparan, kesadaran akan kesetaraan gender, menurunkan angka kematian bayi maupun balita, dan menurunkan angka kematian ibu melahirkan. Tujuannya selaras pada usaha mempercepat pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) untuk menghilangkan angka kemiskinan dalam berbagai bentuk. Lebih lanjut untuk menanggulangi kemiskinan di Jawa Tengah terutama Kabupaten Wonogiri, berdasarkan Perpres No. 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan serta Permensos No.1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH) yang kemudian dijadikan pedoman bagi Kabupaten Wonogiri dalam Perda Kab.Wonogiri No.3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Dinas Sosial Kabupaten Wonogiri telah menjalankan PKH sejak tahun 2011 yang diselenggarakan untuk 19 kecamatan. Pada tahun 2018 ditingkatkan menjadi 25 kecamatan. Dampak dari PKH di Kabupaten Wonogiri merupakan mengurangi nilai kemiskinan yang terdapat pada Kabupaten Wonogiri.

Keberhasilan Kabupaten Wonogiri dalam mengurangi kemiskinan sebagai capaian target pembangunan dibuktikan pada saat ajang Perhargaan Pembangunan Daerah Tingkat Nasional Tahun 2021, Kabupaten Wonogiri berhasil menduduki urutan nomor tiga. Walaupun Kabupaten Wonogiri memperoleh penghargaan diatas, masih saja ditemukan ketimpangan pada kecamatan di Kabupaten Wonogiri,

yaitu Kecamatan Ngadirojo, Slogohimo, dan Kecamatan yang masih kesulitan dengan mengurangi keluarga miskin pada Kabupaten Wonogiri yaitu Kecamatan Kismantoro. Kesuksesan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Wonogiri 2020 sampai dengan 2022 dapat dikatakan cukup baik, melihat dari tabel diatas adanya penurunan jumlah keluarga miskin pada tahun 2020 sebesar 121.440 KK menjadi 70.681 KK pada tahun 2022. Akan tetapi masih terdapat kecamatan yang tidak maksimal dalam pengentasan kemiskinan yaitu Kecamatan Kismantoro dimana memiliki jumlah pengangguran terbanyak di Kabupaten Wonogiri walaupun sejak tahun ke tahun menurun dan adanya perbedaan yang signifikan dengan penurunan keluarga pada Kecamatan Slogohimo dan Kecamatan Ngadirojo.

Selanjutnya pemerintah Kabupaten Wonogiri mengeluarkan Perda No.3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Dinas Sosial selaku pelaksana Program Keluarga Harapan sudah melakukan pendampingan serta sosialisasi kepada masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat miskin di kecamatan-kecamatan di Kabupaten Wonogiri. Sosialisasi meliputi materi mengenai kesehatan, pendidikan serta pemberdayaan masyarakat khususnya masalah perekonomian keluarga untuk mencapai tujuan meningkatkan taraf kesejahteraan sosial fakir miskin terutama di Kecamatan Kismantoro Kabupaten Wonogiri.

Program ini di kecamatan-kecamatan di Wonogiri telah dijalankan sebaik mungkin, akan tetapi di Kismantoro tingkatan prioritas penentuan PKH belum terakomodasi dengan tepat, yang sepatutnya khusus pada warga miskin namun pada kenyataannya ada pula yang menerima bantuan tersebut dari golongan yang masih mampu. Hal ini disebabkan tahapan validasi data yang dipakai belum adanya keakuratan, ditambah dengan kondisi geografis kecamatan yang pegunungan membuat sinyal untuk melakukan verifikasi data terhambat berbeda dengan Kecamatan Slogohimo apalagi Kecamatan Ngadirojo yang lebih mudah dalam akses jalannya. Selain itu pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan hanya 1 kali dalam sebulan, seharusnya dapat dilaksanakan 2 kali dalam sebulan. Hal ini membuat rendahnya partisipasi masyarakat dalam PKH. Dampak lain yang dirasakan adalah kurang pahami masyarakat mengenai PKH dan manfaatnya. Dengan demikian penulis mengetahui dan mendapatkan pelajaran untuk lebih meningkatkan program tersebut di daerah tertinggal, menyetarakan peningkatan program tersebut setidaknya setara dengan daerah-daerah lain yang dengan pusat pemerintahan daerah serta membuat partisipasi masyarakat terkait PKH tinggi melalui sosialisasi yang maksimal. Hal ini dilakukan supaya adanya keluarga miskin mengalami penurunan dan masyarakat sejahtera secara merata sesuai harapan Pemerintah Indonesia.



## 1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penulisan)

Ada beberapa permasalahan berkaitan dengan evaluasi kebijakan perlindungan sosial keluarga harapan di tiga kecamatan Kabupaten Wonogiri. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai pelaksanaan Program Keluarga Harapan apakah telah sesuai dengan tujuan, dengan demikian hasil pelaksanaannya tidak dapat diketahui sebelum dilakukan evaluasi. Dari data yang didapatkan melalui seluruh lokasi penelitian, penulis menemukan beberapa permasalahan dari Program Keluarga Harapan, yaitu:

Pertama, kurang memadainya sarana, prasarana, dan teknologi yang menunjang PKH itu sendiri. Hal itu ditunjukkan dengan sarana, prasarana, dan teknologi di Kabupaten Wonogiri khususnya di Kecamatan Ngadirojo, Slogohimo, dan Kismantoro tidak setara apabila dibandingkan dengan sarana prasarana di kabupaten lain.

Kedua, minimnya sumber daya aparatur terutama pendamping sosial PKH. Hal ini terlihat dari kurangnya jumlah pendamping sosial PKH yang tidak seimbang jumlah KPM yang sangat banyak, normalnya satu pendamping PKH mendampingi 250 KPM namun saat ini satu pendamping bisa mendampingi hingga 300 lebih KPM sehingga terkadang para pendamping sosial PKH kewalahan dalam pelaksanaan PKH ini.

## 1.3 Penulisan Terdahulu

Penelitian pertama dilaksanakan Khalid Zamri dan Ria Ariani (2022) berjudul “Efektivitas Perlindungan Sosial Masyarakat melalui Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap Kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Era Pandemi Covid-19”. Relevansi antara riset berikut dengan penulisan penulis yaitu ada di fokus penulisan yaitu perlindungan sosial dan PKH. Sementara itu, perbedaan ada di metode penulisan yang dipakai, penulisan sebelumnya memakai *mixed method* sementara penulisan penulis adalah kualitatif. Selain itu, teori yang digunakan serta lokus penulisan terdahulu berbeda dibandingkan lokus penulisan penulis.

Penulisan kedua dilakukan oleh Jumiani (2021) berjudul “Pelaksanaan Program Keluarga Harapan dalam Memberikan Perlindungan Sosial Masyarakat Desa Pompengan Kecamatan Lamasi Timur Kabupaten Luwu”. Relevansi dari penulisan ini dengan penulisan penulis adalah fokus penulisan, yakni perlindungan sosial, PKH dan kemiskinan. Di samping itu, perbedaannya terletak pada lokus yang digunakan dan pendekatan yang digunakan yaitu sosiologis.

Penulisan ketiga dilakukan oleh Ade Ayu Murti Asih, dkk. (2022) berjudul “*Implementation Of Social Protection Policy Through PKH In Rural Society*”. Relevansi penulisan ini dengan penulisan penulis terletak pada fokus yang dibahas yaitu kebijakan perlindungan sosial, PKH, dasar hukumnya, serta metode

penulisannya berupa metode deskriptif kualitatif. Sementara itu, perbedaan yang mendasar adalah pada lokus penulisan.

#### **1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penulisan yang berbeda dan belum dilakukan oleh penulisan terdahulu, dimana fokus penulisan yang dilakukan penulis berbeda dari penulisan sebelumnya selain itu lokasi penulisan yang dilakukan penulis yaitu pada tiga kecamatan di Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah. Berbeda dari Khalid Zamri, Jumiani, dan Ade Ayu Murti. Selain itu terdapat perbedaan teori yang digunakan dalam kedua penulisan diatas dengan penulisan yang akan dilakukan oleh penulis, dan juga terdapat perbedaan hasil penulisan yang akan dijelaskan pada bab 4. Penulis ingin menjadikan tiga penulisan ini sebagai penguat penulisan yang akan dilakukan dalam Evaluasi Kebijakan Perlindungan Sosial Keluarga Harapan di Kabupaten Wonogiri (Kecamatan Ngadirojo, Slogohimo, dan Kismantoro). Karena penulisan tersebut dapat menjadi cerminan untuk dipelajari lebih lanjut bagaimana Evaluasi Kebijakan Perlindungan Sosial Keluarga Harapan di Kabupaten Wonogiri dan untuk mengetahui bagaimana kebijakan yang dibuat dengan mempertimbangkan berbagai kondisi dan kebutuhan yang diterapkan untuk penulisan yang akan dilakukan. Walaupun pengukuran/indikator yang digunakan juga berbeda dari penulisan sebelumnya yakni menggunakan pendapat dari Leo Agustino yang menyatakan bahwa evaluasi kebijakan terbagi menjadi 5 indikator, yaitu sumber daya aparatur, kelembagaan, finansial, sarana prasarana teknologi, dan regulasi.

#### **1.5 Tujuan**

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan PKH di Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah ditinjau dari kesesuaian sumber daya aparatur, mengetahui pelaksanaan PKH di Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah ditinjau dari kesesuaian kelembagaan, mengetahui pelaksanaan PKH di Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah ditinjau dari kesesuaian sarana, prasarana, dan teknologi, mengetahui pelaksanaan PKH di Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah ditinjau dari kesesuaian finansial, mengetahui pelaksanaan PKH di Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah ditinjau dari kesesuaian regulasi.

## **II. METODE**

Penulisan ini dilaksanakan berdasarkan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif melalui pendekatan induktif. Alasan penulis sendiri menggunakan pendekatan kualitatif karena penulis merasa fleksibel dan dapat menyelesaikan permasalahan dengan mudah jika dihadapkan pada subjek penulisan dan fakta dilapangan terhadap objek penulisan. Selanjutnya metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan suatu fenomena yang muncul pada saat evaluasi Program



Keluarga Harapan di Kabupaten Wonogiri selanjutnya ditelaah dengan pendekatan induktif serta disimpulkan sesudah data digabungkan serta diobservasi sebelumnya. Dalam metode ini diperlukan teknik pengumpulan data atau informasi mengenai fenomena masalah yang akan diteliti, analisis data dan cara dalam menemukan data-data dari fakta yang ada di lapangan. Penulis mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan triangulasi gabungan. Penulis melakukan wawancara terhadap 15 informan. Dimana konsep yang digunakan oleh penulis adalah berpedoman kepada teori evaluasi kebijakan oleh Leo Agustino dengan indikator yang digunakan yaitu Sumber Daya Aparatur, Finansial, Kelembagaan, Sarana Prasarana Teknologi, dan Regulasi.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah ditinjau dari Kesesuaian Sumber Daya Aparatur**

Dimensi sumber daya aparatur ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana keberhasilan dari kebijakan perlindungan sosial dalam pelaksanaan program keluarga harapan di Kabupaten Wonogiri terutama pada tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Ngadirojo, Kecamatan Slogohimo, dan Kecamatan Kismantoro. Adapun indikator dari dimensi sumber daya aparatur ini yaitu:

##### **3.1.1 Aparatur yang Siap**

Aparatur yang siap merupakan pegawai yang bekerja di Dinas Sosial Kabupaten Wonogiri dalam menjalankan kebijakan yang ada yaitu kebijakan perlindungan sosial. Selain memiliki 13 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam menjalankan tugasnya, Dinas Sosial Kabupaten Wonogiri juga memiliki 16 orang Pegawai Honorer dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang ada. Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa jumlah pegawai di lingkungan Dinas Sosial saat ini cukup ideal. Selain itu, seluruh aparatur yang ada di lingkungan Dinas Sosial dinilai menguasai tugas pokok dan fungsi masing-masing bagiannya.

##### **3.1.2 Tenaga Ahli**

Tenaga ahli pada dimensi sumber daya aparatur ini dimaksud dengan sumber daya aparatur yang benar-benar menekuni dan secara langsung terjun ke lapangan berkenaan dengan bentuk kebijakan yang ada. Dalam hal ini adalah kebijakan perlindungan sosial dalam pelaksanaan PKH. Pelaksanaan PKH ini didukung dengan adanya penyuluhan atau dikenal dengan istilah Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) yang dibantu tenaga ahli yaitu pendamping sosial PKH yang notabeneanya turun ke lapangan secara langsung. Sebagaimana tabel terkait dengan pendamping sosial PKH per kecamatan serta jumlah desa yang didampingi sebagai berikut:

**Tabel 4.12**  
**Daftar Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan di Kecamatan**  
**Ngadirojo 2023**

NO	NAMA	DESA DAMPINGAN	JUMLAH KPM
1	ESTER WINDARTI SULASIH, S.Pd	DESA KERJO LOR	239
		KELURAHAN MLOKOMANIS KULON	98
2	PARYATI, S.Pd	DESA GEDONG	149
		DESA JATIMARTO	116
		DESA NGADIROJO KIDUL	207
3	ARI KUSUMASTUTI, S.Hut	DESA MLOKOMANIS WETAN	136
		DESA PONDOK	161
4	GALIH SAKA, S.Pd	DESA GEMAWANG	171
		KELURAHAN KASIHAN	101
5	DYAH ASTUTI SETYANINGSIH	DESA KERJO KIDUL	206
		DESA NGADIROJO LOR	90

Sumber: UPPKH Kecamatan Ngadirojo, 2023

**Tabel 4.13**  
**Daftar Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan di Kecamatan**  
**Slogohimo 2023**

No	NAMA	DESA DAMPINGAN	JUMLAH KPM
1	ENI RAHAYU, S.Sos.	KELURAHAN BULUSARI	215
		DESA PANDAN	247
		DESA SOKOBOYO	142
2	FIQIH KARTIKA KUSUMANINGTYAS, M.Pd.	KELURAHAN KARANG	215
		DESA WARU	81
		DESA TUNGGUR	206
3	DANI KURNIAWAN, S.Pd.	DESA PADARANGIN	164
		DESA GUNAN	195
		DESA KLUNGGEN	108
4	DION SYAMWERDO BAGUS PRAKOSO, S.Pd.	DESA SETREN	87
		DESA RANDUSARI	107
		DESA SEDAYU	107
		DESA SOCO	103
5	ANGGIA LARAS TIA, S.Tr.Sos.	DESA SLOGOHIMO	133
		DESA MADE	97
		DESA SAMBIREJO	64
		DESA WATUSOMO	149

Sumber: UPPKH Kecamatan Slogohimo, 2023



**Tabel 4.14**  
**Daftar Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan di Kecamatan**  
**Kismantoro 2023**

No	NAMA	DESA DAMPINGAN	JUMLAH KPM
1	AGUS SARYANTO, S.T.	KELURAHAN GESING	365
		DESA BUGELAN	
2	TAUFIK ISMAIL, S.Pd. SD.	DESA MIRI	360
		DESA BUGELAN	
3	WAHYU NURJANNAH, S.TP.	DESA PLOSOREJO	366
		KELURAHAN GESING	
		KELURAHAN KISMANTORO	
4	ERNA KARMIN, S.Pd.	DESA NGROTO	370
		DESA BUGELAN	
		KELURAHAN KISMANTORO	
5	DIAN SAVITRI PURWITASARI, S.Pd.	DESA PUCUNG	351
		DESA LEMAHBANG	
		KELURAHAN KISMANTORO	
6	ARI KURNIAWATI, S.IP	DESA GAMBIRANOM	375
		DESA BUGELAN	
		DESA GEDAWUNG	
7	ISFI ARY PUSPITA, A.Md. Kep	DESA GEDAWUNG	357
		DESA BUGELAN	
		KELURAHAN KISMANTORO	
8	SAWITRI, S.Pd SD	DESA LEMAHBANG	352
		DESA BUGELAN	

Sumber: UPPKH Kecamatan Kismantoro, 2023

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan terdapat SDM berupa tenaga ahli yang membantu jalannya program dari kebijakan perlindungan sosial ini.

Berdasarkan pembahasan dua indikator pada dimensi sumber daya aparatur diatas, maka peneliti menyimpulkan bahwa pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kabupaten Wonogiri belum mencukupi. Hal ini terlihat dari kurangnya jumlah pendamping sosial PKH yang tidak seimbang jumlah KPM yang sangat banyak, normalnya satu pendamping PKH mendampingi 250 KPM namun saat ini satu pendamping bisa mendampingi hingga 300 lebih KPM sehingga terkadang para pendamping sosial PKH kewalahan dalam pelaksanaan PKH ini namun program dari kebijakan perlindungan sosial ini harus tetap berjalan dengan baik

### **3.2 Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah ditinjau dari Kelembagaan**

#### **3.2.1 Koordinasi dan komunikasi antar-stakeholder terkait**

Koordinasi dan komunikasi antar-stakeholder terkait ini dimaksudkan adalah adanya koordinasi mengenai pelaksanaan Program Keluarga Harapan yang ada di Kabupaten Wonogiri. Dalam pelaksanaan Program Keluarga harapan ini Dinas Sosial melakukan koordinasi dengan dinas terkait dan pendamping sosial PKH untuk meningkatkan kemampuan KPM melalui P2K2 dan verifikasi validasi

DTKS. Berdasarkan wawancara yang dilakukan, dapat diketahui bahwa komunikasi dan koordinasi sudah berlangsung cukup baik sehingga bantuan sosial PKH ini dapat berjalan dengan baik dan tepat sasaran.

Disamping itu, pendamping sosial PKH juga memberikan sosialisasi melalui P2K2 dengan materi modul-modul yang diberikan oleh Dinas Sosial untuk mengubah *mindset* KPM agar mau berkembang.

### **3.3 Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kabupaten Wonogiri ditinjau dari Finansial**

Dalam pelaksanaan suatu program dari sebuah kebijakan, pasti harus ada berbagai sumber dana yang mencukupi guna menunjang keberhasilan program tersebut. Dana atau finansial disini adalah suatu faktor yang sangat penting.

#### **3.3.1 Aspek Keuangan yang Mendukung**

Dinas Sosial Kabupaten Wonogiri, dalam kebijakan perlindungan sosialnya, terutama untuk pelaksanaan Program Keluarga Harapan ini menggunakan sumber dana yang berasal dari APBN untuk menunjang penyaluran bantuan sosial ini secara maksimal.

Realisasi penyaluran dana bantuan PKH di Kecamatan Ngadirojo, Slogohimo, dan Kismantoro sebagian besar hampir 100% tersalurkan, namun belum sampai 100% dari 3 kecamatan tersebut. Hal ini disebabkan karena adanya verifikasi dan validasi, apabila memang sebelumnya sudah tercatat sebagai KPM PKH, namun pada waktu tertentu kriterianya sudah tidak memenuhi, maka KPM PKH tersebut tidak akan mendapat bantuan sosial PKH. Kriteria penerima PKH wajib ada dan wajib dipenuhi pada saat KPM akan mencairkan dana bantuan sosial ini sehingga dana bantuan sosial ini diharapkan selalu tepat sasaran.

Berdasarkan pembahasan dimensi finansial indikator aspek keuangan yang mendukung di atas, maka peneliti menyimpulkan bahwa penggunaan anggaran sudah sangat efektif dan efisien yang mana dana tersebut bersumber dari APBN.

### **3.4 Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kabupaten Wonogiri ditinjau dari Sarana, Prasarana, dan Teknologi**

#### **3.4.1 Sarana, prasarana, dan teknologi yang tersedia**

Program Keluarga Harapan sebagai salah satu kebijakan perlindungan sosial dalam pelaksanaannya membutuhkan sarana, prasarana, dan teknologi yang digunakan untuk menunjang program ini supaya berjalan dengan baik. Sarana, prasarana, dan teknologi ini digunakan oleh para pelaksana program dan para penerima manfaat dari program ini. . Sarana, prasarana, dan teknologi yang menunjang Program Keluarga Harapan di Kabupaten Wonogiri adalah sebagai berikut:



**Tabel 4.16**  
**Daftar Sarana, Prasarana, dan Teknologi untuk Program Keluarga Harapan**  
**Kabupaten Wonogiri**

No	Nama Barang	Peruntukan
1	Laptop	25 Kecamatan
2	Printer	25 Kecamatan
3	Kursi	131 Pendamping
4	Meja	131 Pendamping
5	<i>Filling cabinet</i>	131 Pendamping
6	Timbangan badan	131 Pendamping
7	Plakat Kantor PPKH	25 Kecamatan
8	<i>Wireless</i>	25 Kecamatan

Sumber: Kantor Sekretariat UPPKH Kabupaten Wonogiri

Sementara itu, terkait dengan penerapan teknologi bagi pendamping sosial PKH menggunakan aplikasi SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-*Next Generation*). Aplikasi ini membantu para pendamping sosial PKH dalam mengolah dan memperbarui data terkait verifikasi dan validasi mengenai kelayakan rumah tangga atau keluarga dalam mendapatkan bantuan.

Berdasarkan pembahasan dimensi sarana, prasarana, dan teknologi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sarana, prasarana, dan teknologi belum cukup memadai, kendaraan atau alat transportasi dan jumlah modul yang minim untuk menunjang dilaksanakannya P2K2. Namun, sejauh ini Kabupaten Wonogiri masih mampu meniyasati kekurangan-kekurangan itu demi terlaksananya kebijakan perlindungan sosial Program Keluarga Harapan ini.

### **3.5 Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kabupaten Wonogiri ditinjau dari Regulasi**

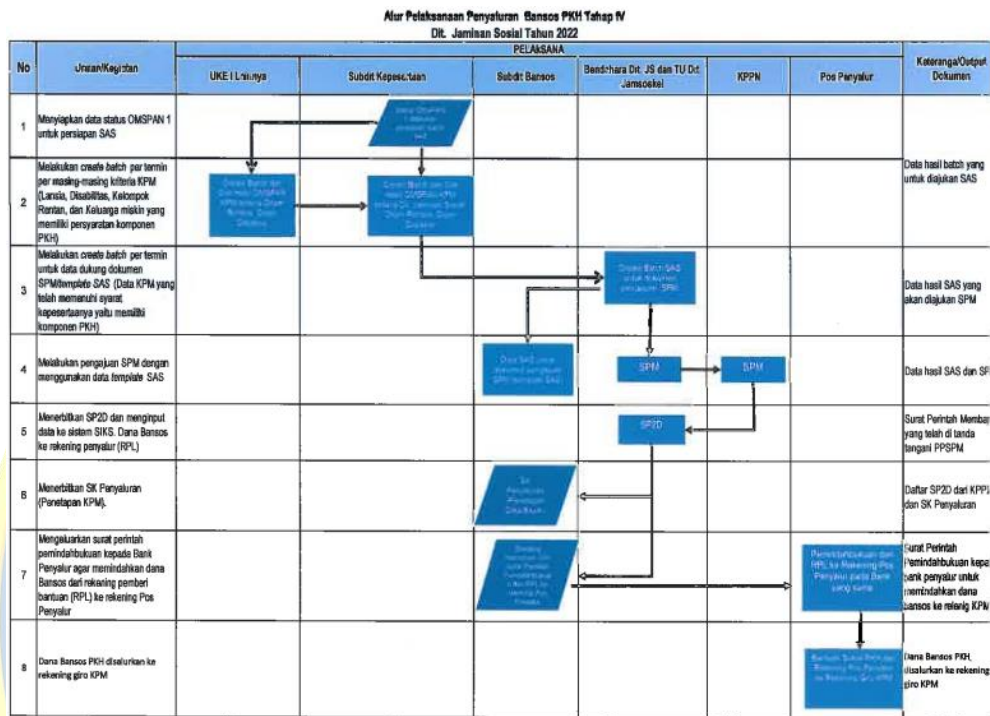
Kebijakan perlindungan sosial dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kabupaten Wonogiri telah sekitar 10 tahun berjalan. Dalam pelaksanaannya ini Program Keluarga Harapan memiliki regulasi. Regulasi ini diterbitkan langsung oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia berupa petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaannya.

#### **3.5.1 Adanya Petunjuk Teknis (Juknis)**

Salah satu petunjuk teknis penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan adalah Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Nomor 78/3/BS.00.01/11/2022 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (Bansos PKH) Tahap IV Tahun 2022. Petunjuk teknis ini juga mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bansos Secara Non Tunai, Program Pemulihan

Ekonomi Nasional (PEN) dan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan.

**Gambar 4.5**  
**Alur Pelaksanaan Penyaluran Bansos PKH Tahap IV**  
**Dit. Jaminan Sosial Tahun 2022**



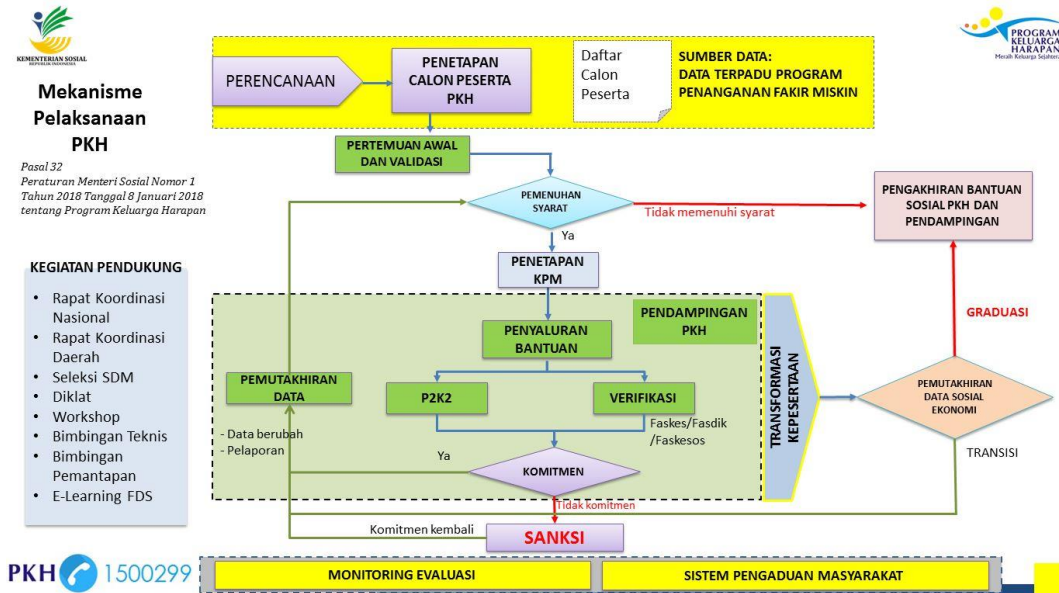
### 3.5.2 Adanya Petunjuk Pelaksanaan (Juklak)

Pembuatan Pedoman Pelaksanaan PKH adalah untuk memberikan panduan tentang kebijakan dan mekanisme dalam pelaksanaan PKH untuk para pelaksana PKH baik di tingkat pusat dan daerah. Berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan tahun 2021-2024, alur pelaksanaan PKH terdiri dari beberapa tahapan, tahapan tersebut dapat dilihat pada skema alur pelaksanaan PKH berikut ini.



Gambar 4.6

Alur Pelaksanaan Program Keluarga Harapan



Berdasarkan pembahasan dimensi regulasi indikator adanya petunjuk pelaksanaan dan adanya petunjuk teknis di atas, maka peneliti menyimpulkan bahwa pelaksanaan Program Keluarga Harapan yang dijalankan Kabupaten Wonogiri telah sesuai dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan yang ada sehingga program dapat berjalan sesuai dengan harapan. Petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan sangat penting karena menjadi patokan dan standar dalam melaksanakan program demi terciptanya ketepatan dalam pelaksanaan suatu kebijakan atau program.

3.6 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pada penelitian ini penulis menemukan bahwa pada penelitian ini penulis melaksanakan evaluasi kebijakan suatu program. Yang mana terdapat suatu kebijakan sebagai bahan evaluasi pada pembuatan kebijakan selanjutnya seperti yang dilaksanakan pada Dinas Sosial Kabupaten Wonogiri. Berdasarkan Pengamatan, wawancara dan pengumpulan dokumen terkait evaluasi kebijakan suatu program. Pelaksanaan Keluarga Harapan di 3 Kecamatan yang ada di Kabupaten Wonogiri ini berbeda dengan penelitian Khalid Zamri dan Ria Ariani (Khalid Zamri, Ria Ariani, 2022) dimana dalam penelitian kali ini pelaksanaan kegiatannya sudah ada aturan lebih terperinci yang mengikat serta untuk pembiayaan pelaksanaan kegiatan di Kabupaten Wonogiri sudah melalui Kantor Pos bukan lagi HIMBARA. Sehingga dapat dikaatakan bahwa temuan penelitian ini cukup berbeda dengan penelitian sebelumnya dan dalam pelaksanaan kegiatannya pun dapat berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku serta tepat waktu.

Disamping itu penelitian ini cukup berbeda dengan temuan penelitian Jumiani (Jumiani, 2021) dimana jika dalam penelitian sebelumnya partisipasi warga dalam bantuan sosial ini tergolong rendah maka dalam penelitian kali ini dapat dikatakan

cukup tinggi dari sehingga dapat dilihat bahwa dengan adanya aturan yang lebih terperinci mengenai kebijakan perlindungan sosial keluarga harapan di Kabupaten Wonogiri sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga pelaksanaan kebijakan perlindungan sosial tersebut dapat dikatakan berjalan sukses dan lancar.

Penelitian ini menguatkan penelitian sebelumnya yakni penelitian oleh Ade Ayu Murti (Asih, Ade Ayu Murti,2022) Bahwa di penelitian sebelumnya disebutkan bahwa masih kurangnya pedoman teknis yang lebih terperinci sehingga kegiatan tersebut berjalan tidak sesuai aturan.

### **3.7 Diskusi Temuan Menarik Lainnya**

Penulis menemukan hal-hal yang masih belum maksimal dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan sosial keluarga harapan di Kabupaten Wonogiri, utamanya di Kecamatan Ngadirojo, Kecamatan Slogohimo, dan Kecamatan Kismantoro. Disamping itu, penulis juga menemukan fakta bahwa Kecamatan Kismantoro yang secara angka kemiskinan paling tinggi di antara kecamatan-kecamatan lain, namun angka graduasi dari Program Keluarga Harapan disini sangat bagus.





#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penulisan yang dilakukan oleh penulis di Dinas Sosial Kabupaten Wonogiri, Kecamatan Ngadirojo, Kecamatan Slogohimo, dan Kecamatan Kismantoro. Maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Ditinjau dari kesesuaian sumber daya aparatur adalah belum memadai. Hal ini terlihat dari kurangnya jumlah pendamping sosial PKH yang tidak seimbang jumlah KPM yang sangat banyak sehingga terkadang para pendamping sosial PKH kewalahan.
2. Ditinjau dari kesesuaian kelembagaan dilihat dari indikator koordinasi dan komunikasi antar-*stakeholder*, koordinasi dan komunikasi antara dinas-dinas terkait, pendamping sosial PKH, perangkat daerah setempat, serta keluarga penerima manfaat yang terjalin dengan baik.
3. Ditinjau dari kesesuaian sarana, prasarana, dan teknologi adalah belum cukup memadai, kendaraan atau alat transportasi dan jumlah modul yang minim untuk menunjang dilaksanakannya P2K2.
4. Ditinjau dari kesesuaian finansial, penggunaan anggaran sudah sangat efektif dan efisien.
5. Ditinjau dari kesesuaian regulasi. Pelaksanaan Program Keluarga Harapan yang dijalankan Kabupaten Wonogiri telah sesuai dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan yang ada sehingga program dapat berjalan sesuai dengan harapan.

**Keterbatasan Penulisan:** Penulisan ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu penulisan, dimana penulishanya diberikan waktu 15 hari untuk mengidentifikasi permasalahan di lapangan dengan jumlah lokasi penulisan yang banyak dan jarak antar lokasi yang cukup jauh. Tidak hanya itu dikarenakan waktu penulisan yang singkat penulis keterbatasan untuk mejangkau ruang lingkup penulisan yang lebih luas dalam mengidentifikasi permasalahan yang terkait pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kabupaten Wonogiri.

**Arah Masa Depan Penulisan (*future work*):** Penulis menyadari masih awalnya temuan penulisan, oleh karena itu penulis menyarankan supaya dapat dilakukan penulisan lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan Evaluasi Kebijakan Perlindungan Sosial Keluarga Harapan di Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

#### V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penulisan, serta seluruh pihak yang membantu dan menyukseskan pelaksanaan penulisan.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2019). *Dasar-dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi)*. Alfabeta.
- Ade Ayu Murti Asih, Tharisma Novitasari, A. S. N. dan K. E. W. (2022) berjudul "Implementation Of Social Protection Policy Through PKH In Rural Society". *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 2(5), 886–896.
- Jumiani. (2021). *Program Keluarga Harapan (Pkh) Dalam Memberikan Perlindungan Sosial Masyarakat Desa Pompengan Kecamatan Lamasi Timurkabupaten Luwu*.
- Zamri, K., & Ariani, R. (2022). Efektivitas Perlindungan Sosial Masyarakat Melalui Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Di Era Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pada Kelurahan Koto Tengah Kota Payakumbuh). *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS)*, 2(1), 343–353. <https://doi.org/10.47233/jeps.v2i1.108>

